

## **BAB I PENDAHULUAN**

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2020 disusun dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2020 disusun berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum 2020. Laporan SAKIP yang disusun dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan.

### **A. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum yang berkantor di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 3 Telepon (024) 6921607 Fax. (024) 6924980 Ungaran 50517 mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dinas Pekerjaan Umum, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Daftar Jabatan Dan Eselon Dinas Pekerjaan Umum

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
--------------	--------	--------

Kepala Dinas	IIb	1
Sekretaris	IIIa	1
Kepala Bidang	IIIb	5
Kepala Subbagian	IVa	3
Kepala Seksi	IVa	12
Kepala UPTD	IVa	1
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD	IVb	1
Jumlah		24

**Dengan Susunan Organisasi :**

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi :
  1. Subbagian Perencanaan.
  2. Subbagian Keuangan.
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga membawahi :
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- d. Bidang Sumber Daya Air membawahi :
  1. Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  2. Seksi Operasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Bangunan membawahi :
  1. Seksi Bangunan dan Gedung.
  2. Seksi Pembinaan Tata Bangunan.
- f. Bidang Cipta Karya membawahi :
  1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
  2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
  3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi.
- g. Bidang Tata Ruang membawahi :
  1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
  2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. UPTD Laboratorium Bangunan Sipil, Pengelolaan Alat Berat dan Rumah Susun Sederhana sewa (Rusunawa) Tipe A, terdiri dari:
  1. Kepala ;
  2. Subbagian Tata Usaha ; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

**B. Ketersediaan Sumber daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perangkat daerah ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 270 personil, yang terdiri dari 187 personil PNS, dan 83 personil Non Personil.

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Klasifikasi	Jumlah
Komposisi Menurut Golongan	
• - Golongan IV	11
• - Golongan III	56
• - Golongan II	79
• - Golongan I	14
Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
• - Sarjana S2	19
• - Sarjana S1	30
• - Sarjana Muda / D3	4
• - SLTA	78
• - SMP	31
• - SD	11
Komposisi Menurut Umur	
• - 20 - 30 tahun	5
• - 31 - 40 tahun	12
• - 41 - 50 tahun	67
• - 51 - 58 tahun	76
Jumlah	187

### C. Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi
--------	--------	------------	---------

Tanah	779	664.182.795.108	
Gedung	74	78.283.947.367	
Peralatan / Mesin		21.329.639.540	
Jalan irigaasi, jaringan	4720	1.579.694.060.732	
Aset dan lainnya	156	6.670.563.660	
Jumlah		2.350.161.006.407	
Penyusutan		596.924.908.697	

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas 0,05 % merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat sedangkan sisanya dalam kondisi baik

#### **D. Ketersediaan Sumber Daya keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun berkenaan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah ini didukung anggaran dengan rincian sebagai berikut :

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Anggaran</b>
Belanja Tidak Langsung	Rp. 13.700.664.000
Belanja Langsung :	
Belanja Pegawai	Rp. 469.540.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 68.244.148.000
Belanja Modal	Rp. 100.743.381.000
Jumlah	Rp. 183.157.733.000

#### **E. Permasalahan Utama**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat
  - a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.
  - b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.
  - c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang belum optimal.
  - d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.
2. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap
- b. Masih banyak jalan yang lebarnya belum memenuhi kapasitas jalan
- c. Laju kerusakan jalan yang lebih besar daripada laju perbaikan jalan

### 3. Bidang SDA dan ESDM

- a. Terdapat defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur.
- b. Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di kabupaten, yaitu Wilayah sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
- c. Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;
- d. Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu , disebabkan keterbatasan anggaran daerah,
- e. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang disebabkan keterbatasan penguasaan teknologi energi baru terbarukan dan pe-mahaman masyarakat mengenai energi baru terbaru-kan masih terbatas,
- f. Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam di wilayah.
- g. Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas.
- h. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan yang mengubah mineral bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.

### 4. Bidang Bangunan dan Tata Ruang

- a. Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung pemerintah, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.
- b. Belum sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang menjadi acuan dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang.
- c. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fung-si lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi ciri khas Kabupaten Semarang.

### 5. Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung
- b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.
- c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penye-diaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,
- e. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyrakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,
- f. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung akseibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,

### 6. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan

- a. Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Blondo ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan dengan teknolpgi sederhana.
- b. Perlunya penanganan ruang terbuka hijau guna memenuhi kebutuhan paru - paru kota
- c. Perlunya penyediaan tempat pemakaman umum yang memadai
- d. Banyak titik lampu yang belum termeterisasi dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang;
- e. Pemakaian lampu yang tidak sesuai dengan kelas jalan dan standar PLN
- f. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan LPJU

## **F. Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk implementasi akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah berdasarkan tugas pokok fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara valid dan akuntabel

## **G. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja**

Pada bagian ini disampaikan dasar dasar hokum yang mendasari pentingnya penyampaian laporan kinerja perangkat daerah sebagai upaya pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah selama masa kerja tahun berkenaan. Contoh :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **H. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II :Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berjalan dengan sasaran strategis yang ingin diraih pada tahun sebelumnya, kaitan sasaran tersebut dengan visi - misi dalam Renstra

Bab III :Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV :Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran - lampiran

